



KEBIJAKAN PIMPINAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Muhammad Mugni Siregar

MAS PP. Raudhatul Hasanah

Email: mhd.mugni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan, pelaksanaan kebijakan, kinerja, dan dukungan *stakeholders* kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan kurikulum pendidikan madrasah. Data diperoleh melalui analisis deskriptif dari jurnal dan buku-buku otoritatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) Perumusan kebijakan pimpinan pesantren dilakukan melalui rapat tahunan dan musyawarah yang dihadiri oleh para pimpinan, ketua bidang, para kepala sekolah/madrasah, guru-guru serta masyarakat merumuskan lima program kerja dalam kaitannya dengan sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, sumber daya dan aksi pelayanan, 2) Pelaksanaan rumusan program pengembangan kurikulum yang diterapkan selanjutnya disosialisasikan kepada dan melalui Bidang-bidang yang telah disusun, 3) Kinerja pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren disesuaikan dengan perkembangannya serta sesuai dengan kebutuhan pesantren, 4) Dukungan *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren bahwa sangat mendukung di lingkungan internal, begitu pula dari eksternal/masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Pimpinan Pesantren, Pengembangan Kurikulum.

ABSTRACT

This study aims to determine the process of formulation, policy implementation, performance, and support of policy stakeholders of pesantren leaders in the development of madrasah education curriculum. Data were obtained through descriptive analysis of authoritative journals and books. The results of this study are 1) The formulation of policies for pesantren leaders is carried out through annual meetings and deliberations attended by leaders, heads of fields, principals of schools / madrasahs, teachers and the community formulate five work programs in relation to movement systems, organization and leadership, networks, resources and service actions, 2) The implementation of the formulation of curriculum development programs that are applied is then disseminated to and through fields that has been compiled, 3) The performance of the implementation of the policies of the leaders of the pesantren is adjusted to its development and in accordance with the needs of the pesantren, 4) Support of stakeholders in the implementation of the policies of the leaders of the pesantren that is very supportive in the internal environment, as well as from the external / community.

Keywords: Policy, Leadership of Islamic Boarding School, Curriculum Development.

Pendahuluan

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro misalnya di sekolah/madrasah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lain.

Pendidikan sebagai sebuah organisasi juga butuh kerjasama yang kompak, kebersamaan dan komitmen. Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari beberapa pihak, maka kepemimpinan dan manajemen dapat memainkan peran-peran strategis. Untuk itu, penciptaan kultur organisasi modern dalam pendidikan sangat penting dilakukan. Kultur organisasi modern akan membentuk orang pada disiplin yang tinggi, membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab pada pekerjaannya dan memiliki jiwa untuk pengabdian bagi kepentingan umum. Jika hal ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka mutu yang baik akan segera tampak. Kultur organisasi yang efektif bagi lembaga pendidikan memerlukan kolaborasi dan kooperasi antar komunitas, baik intern dan ekstern. Kolaborasi dan kooperasi yang intensif hanya dapat tercapai manakala tumbuh dari style manajemen dan pola kepemimpinan yang efektif.

Pondok pesantren disebut sebagai sebuah organisasi, karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan menejemen yang unik, yaitu penerapan nilai-nilai agama yang dijadikan basis pengembangan organisasi di setiap perubahan zaman. Peran pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren senantiasa mengundang daya tarik untuk ditelusuri dan dibutuhkan kajian yang komprehensif tentang liku-liku pergulatan pondok pesantren dalam merespon tantangan zaman dan realitas sekitar. Pesantren telah memiliki peran yang sangat besar di dalam pengembangan sumber daya manusia. Pesantren telah menjadi center of excellence bagi pengembangan SDM yang memiliki basis moralitas di dalam kehidupan sosial. Tidak terhitung banyaknya alumni pesantren yang menjadi ulama, kiai dan pemimpin agama baik ditingkat lokal maupun nasional.

Kata kebijakan berasal dari kata policy. Policy sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata "policy" dalam bahasa Yunani adalah "polis" berarti negara kota, sedang bahasa Sansekerta "pur" berarti kota. Kata ini berkembang dalam bahasa Latin "politic" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris Pertengahan kata "policie" menunjuk kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Asal kata "policy" sama dengan asal kata dua kata latin yaitu "polis" dan "politic". Kelihatannya hal terakhir ini dapat memberikan penjelasan mengapa dalam bahasa modern, seperti Jerman dan Rusia hanya mempunyai satu kata (politik, politikal) yang keduanya menunjuk kepada kebijakan dan politik (Su'ud: 2011: 2). Untuk itu, kebijakan mengarahkan dan memerlukan pengambilan keputusan.

Veithzal dan Sylviana, mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu masa depan (Vithzal, 2010: 97). Pendapat lain mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara sistem (Tilaar, 2009: 7). Kemudian Hasbullah, (Hasbullah, 2015: 37) memberikan pengertian akan

kebijakan sebagai hal-hal yang mengurus masalah umum, ini berarti administrasi pemerintahan. Pungkasnya, kebijakan lebih menekankan pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif.

Dapat disimpulkan bahwa komponen pengertian kebijakan meliputi: 1) Goal atau tujuan yang diinginkan, 2) Plan yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan, 3) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, 4) Decision, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan menilai rencana, 5) Effect yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak).

Sedangkan Syafaruddin menjelaskan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi” (Syafaruddin, 2008: 76). Untuk itu, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi.

Ditegaskan oleh Masyhud dan Khusnurdilo bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibuat sepenuhnya secara rasional melalui optimalisasi strategi untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka usaha pencapaian tujuan secara maksimum (Masyhud, 2005: 47). Kebijakan dipandang sebagai pedoman untuk bertindak, pembatas perilaku, dan bantuan bagi pengambil keputusan” (Pongtuluran, 1997: 7). Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi, karena dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Abidin menyimpulkan bahwa kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu: pemerintah, masyarakat dan umum. Sehingga dapat disimpulkan pemaknaan ini mencakup subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan, oleh karena itu kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2006: 22).

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi, dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat, artinya keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen kehidupan masyarakat luas.

Dalam perjalanannya, kebijakan yang ditetapkan oleh negara akan bersentuhan dengan segala lini persoalan bangsa, salah satunya sampai kepada pendidikan. Kebijakan pendidikan secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan

hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2006: 36). Mark & O'Neil mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Marget E. Goertz (Nugroho, 2006: 36) juga mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ungkapan atau catatan dari orang itu sendiri atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan tersebut mengarah kepada keadaan dan individu secara holistik (utuh). Dengan demikian, pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian dalam hal membuat kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan kurikulum di pesantren. Pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiono, 2014: 1).

Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memberikan peran yang sangat signifikan terhadap ilmu pendidikan. Secara umum, setidaknya ada dua kepentingan yang sangat erat kaitannya antara kebijakan pendidikan dengan ilmu tersebut. Pertama, dengan kebijakan pendidikan para ilmuwan diharapkan dapat memberikan koreksi untuk memperbaiki pendidikan dalam konteks pelaksanaannya. Kedua, sebagai suatu wadah dalam merumuskan pendidikan yang berkualitas untuk kedepannya (Hasbullah, 2015: 41).

Kebijakan publik dalam pendidikan agar menjamin pendidikan menjadi kepentingan publik (Napitupulu, 2020: 95). Pada awalnya, persekolahan, pendidikan merupakan urusan swasta yang disediakan oleh sebagian kecil masyarakat. Namun, sekolah diciptakan oleh pemerintah untuk seluruh warga. Selanjutnya, kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan dan, 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru (Fattah, 2013: 132-134).

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: 1) Pedoman untuk bertindak, hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan, 2) pembatas perilaku. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan, dan 3) bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan disini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan (Pongtuluran: 1995: 7) Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Sayafaruddin lebih lanjut mengemukakan bahwa fungsi dari kebijakan pendidikan dipandang sebagai: (1) pedoman pelaksanaan pendidikan, (2) pembatas dalam perilaku pendidikan, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan dalam konteks pendidikan” (Syafaruddin, 2008: 78). Begitu pentingnya keberadaan kebijakan pendidikan, karena dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak

hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar (Hasbullah, 2015: 63).

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.

Syaiful Sagala (2008: 99) mengemukakan bahwa secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Empirik (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisa kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

b. Pendekatan Evaluatif (*Evaluatif Approach*)

Evaluasi menurut Imron adalah “salah satu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan atau tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak”. Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan.

Perumusan merupakan tahapan pelaksanaan atas sebuah kebijakan. Interaksi merupakan konsep penting dalam langkah kebijakan yang mengacu pada suatu hubungan yang terkadang sangat kompleks. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu: (1) formulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk kelompok sasaran; siapa yang berperan; dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan, dan (2) dana pendukung yang proporsional, tanpa dana kebijakan tidak akan pernah terealisasi.

Langkah kebijakan menunjuk kepada aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Langkah kebijakan itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Langkah kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Hasbullah, 2015: 38).

Pendapat di atas menerangkan setidaknya ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Terlaksana tidaknya suatu kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor. Para pakar kebijakan memiliki pandangan beragam tentang faktor-faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Selanjutnya faktor yang harus diperhatikan dalam langkah kebijakan adalah aspek isi dari kebijakan itu sendiri (*content of policy*) yang akan memberikan pengaruh

terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta aspek konteks atau lingkungan implementasi (*contex of implementation*) dilakukan. Kedua aspek tersebut dipahami sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses langkah kebijakan.

Perumusan kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan kunci utama yang harus dilakukan sebelum suatu isu kebijakan dianggap dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Tanpa terlebih dahulu masuk dalam agenda, tidak mungkin suatu masalah yang ada pada masyarakat seberapa pentingnya masalah tersebut dapat diangkat menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah (Hasbullah, 2015: 68).

Dalam merumuskan suatu kebijakan, harus terlebih dahulu membuat agenda kebijakan, apakah itu agenda sistematis yaitu semua isu yang secara umum dipandang masyarakat politik sebagai hal yang patut memperoleh perhatian publik, maupun agenda pemerintah yaitu serangkaian masalah yang secara aktif dan serius dari pembuat kebijakan.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu (Hasbullah, 2015: 63). Begitu pula dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, kebijakan yang ditetapkan harus dipertimbangkan secara seksama menyangkut kepentingan publik.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, yang mana aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu.

Paling tidak ada tiga proses yang ditempuh dalam kebijakan, yaitu; formulasi, implementasi dan evaluasi (Jputt, 1980: 30). Ketiga proses kebijakan dimaksud diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik. Sedangkan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan”.

Dapat dijabarkan 1) Penyusunan agenda, kegiatan ini memiliki karakteristik yaitu para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. 2) Formulasi kebijakan, kegiatan ini dimana pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legeslatif. 3) Adopsi kebijakan, dimana alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legeslatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. 4) Implementasi kebijakan, kegiatan ini ditandai dengan kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

Penjelasan di atas sejalan dengan kesimpulan Fatkuroji (2012: 21) bahwa tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya

menjadi suatu kebijakan. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. *Top leader* menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke staf untuk dibicarakan atau dimusyawarahkan.

b. Formulasi kebijakan

Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan yang baik. Model-model ekonomi dan teori pengambilan keputusan merupakan analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik dan meminimalkan resiko kegagalan. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan yang baik, yaitu: (1) rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu, (2) rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi berasal dari kata "legitimacy" yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat.

Legitimasi kebijakan artinya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga pendidikan. Proses kebijakan memerlukan legitimasi guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses.

3. Pengertian Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Pada mulanya istilah kurikulum dijumpai dalam dunia statistik pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata *Curire* yang artinya pelari, dan *Curete* artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan *Curriculum* mempunyai arti "jamak" yang harus ditempuh oleh pelari. Bila dilihat dalam kamus Webster tahun 1812, kurikulum ialah (1) *a race course, a place for running; a chariot*, (2) *acourse, in general; applied particulary to the course of study in a university* (Nurdin: 2003: 33). Maksud pengertian kurikulum sebagaimana definisi tersebut mempunyai dua pengertian, yakni

suatu jarak untuk perlombaan yang harus ditempuh oleh para pelari, dan juga diartikan sebagai *chariot*, yaitu semacam kereta pacu pada zaman dulu yang berupa alat untuk membawa seseorang dari awal atau start hingga finish.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Erwin dan Salim bahwa secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa latin "*curriculum*" yang berarti "*a little race course*" yaitu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olah raga (Mahrus, 2009: 81).

Perkembangan selanjutnya istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, sebagaimana termuat dalam *Webster Dictionare* tahun 1955, kurikulum didefinisikan sebagai berikut : "*a course, especially a specified fixedcourse of study, as in a school or college, as one leading to a degree*". Pada definisi ini terkandung makna bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di akademi/*college* yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu *degree* (tingkat) atau ijazah (Mahrus, 2009: 34).

Dengan demikian makadapat disimpulkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

4. Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu

Tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti: politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Implementasi dari pengembangan kurikulum ialah perubahan kurikulum, seperti realita dilapangan kurikulum selalu digantikan agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Kebijakan pengembangan kurikulum harus dituangkan pada pembelajaran. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah "suatu proses, atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar" (Depdikbud, 1995: 14).

Sedangkan Oemar Hamalik memberi batasan bahwa, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, forografi, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan penyampaian informasi, praktek, belajar dan sebagainya (Hamalik, 1995: 57).

Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran dan istilah belajar mengajar yang dapat kita perdebatkan, atau kita abaikan saja yang penting makna dari ketiganya, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal, pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di madrasah semakin berkembang dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar kegiatan mengajar (pengajaran) yang mengabaikan kegiatan belajar, yaitu kegiatan mengajar pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi.

Terdapat empat garis besar pola pembelajaran, *pertama*, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola pembelajaran ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. *Kedua*, pola (guru plus alat peraga) dengan siswa. Pada pola pembelajaran ini guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. *Ketiga*, pola (guru) plus (media) dengan siswa. Pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru, yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi pola ini pola pembelajaran bergantian antara guru dan media dalam berinteraksi dengan siswa. Konsekuensi pola pembelajaran ini adalah harus disiapkan bahan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. *Keempat*, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka membelajarkan itu tidak hanya sekadar mengajar, karena membelajarkan yang berhasil harus memberikan banyak perlakuan kepada peserta didik. Peran guru dalam pembelajaran lebih dari sekadar sebagai pengajar (informer) belaka, akan tetapi guru harus memiliki multi peran dalam pembelajaran. Agar pola pembelajaran yang diterapkan juga dapat bervariasi, maka bahan pembelajarannya harus dipersiapkan secara bervariasi juga. Menurut Adams & Dickey bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas, meliputi: (a) guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*), (b) guru sebagai pembimbing (*teacher as counselor*), (c) guru sebagai ilmuwan (*teacher as scientist*), dan (d) guru sebagai pribadi (*teacher as person*). Bahkan dalam arti luas, di mana sekolah berubah fungsi menjadi penghubung antara ilmu teknologi dengan masyarakat, dan sekolah lebih aktif ikut dalam pembangunan, maka peran guru menjadi lebih luas.

Sementara Mardianto memberikan uraian yang dimaksudkan pembelajaran merupakan aktivitas dan proses yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari beberapa komponen yaitu : guru, kurikulum, anak didik, fasilitas dan administrasi. Masing-masing komponen tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan rancangan dan pengelolaan belajar yang baik yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Mardianto, 2010: 9). Dimiyanti dan Mudjiono menggambarkan bagaimana peran guru dalam merencanakan pembelajaran dan tindak belajar siswa, sehingga perkembangan peserta didik sesuai asas emansipasi menuju keutuhan dan kemandirian (Dimiyati, 1999: 4).

Untuk itu, pembelajaran akan terlaksana dengan baik serta menghasilkan lulusan yang berkualitas bukan hanya tergantung seberapa hebatnya suatu materi tetapi harus ada guru yang aktif, kreatif, dan terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulum.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan kurikulum madrasah di pesantren dilakukan melalui rapat tahunan dan musyawarah yang dihadiri oleh para pimpinan, ketua-ketua bidang, bidang pendidikan dan

pengajaran, bidang sumber daya manusia, bidang ekstrakurikuler dan bidang kepengasuhan serta para kepala sekolah di sekolah dan guru-guru, komite, masyarakat dalam kaitannya untuk menjabarkan keputusan yang dihasilkan melalui rapat kerja tahunan dan musyawarah pimpinan dan *stakeholder* pesantren. Merumuskan peningkatan pengembangan dan pengawasan kurikulum dalam pembelajaran ruang kelas dan ekstrakurikuler dan bimbingan belajar malam secara holistik integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Dalam rapat tersebut membahas lima program kerja dalam kaitannya dengan sistem gerakan, organisasi dan kepemimpinan, jaringan, sumber daya dan aksi pelayanan. Dari setiap program ini akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan program-program tersebut.

2. Pelaksanaan rumusan kelima program pengembangan kurikulum yang diterapkan di pesantren dilakukan pada muswarah pimpinan dan *stakeholder* disebut dengan rapat tahunan dilaksanakan setiap akhir tahun, selanjutnya disosialisasikan kepada dan melalui Bidang-bidang yang telah disusun yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang sumber daya manusia, bidang pengasuhan dan bidang ekstrakurikuler. Setiap program berisikan kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh atau dilaksanakan selama setiap tahunnya, berkaitan dengan peningkatan kualitas guru, program pengembangan sumber daya menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Dimiyanti dan Mudjiono. (1999). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fattah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hamalik, Oemar. (1995). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah, H.M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Jputt, Allen and J Fred Springer. (1990). *Policy Research*. New Jersey: Prentice Hall.
- Masyhud Sulthon dan Moh. Khusnurdilo. (2005). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Napitupulu, Dedi Sahputra. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama.
- Pongtuluran, Aris. (1995). *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: LPMP, 1995.
- Mardianto. (2010). *Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Medan: Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah.
- Musfah, Jijen. (2015). *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Veithzal, Rivai dan Murni Sylviana. (2010). *Education Management*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan Dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta,.